

PERANAN GURU PPKn DALAM MEMBENTUK SIKAP PARTISIPATIF SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Mutiara Nurmanita
Universitas Negeri Yogyakarta
Mutiara.nurmanita@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan peranan guru PPKn dalam pembentukan sikap partisipasi siswa di sekolah menengah atas. Hal ini latarbelakangi oleh kurangnya partisipasi siswa sekolah menengah atas di kelas sehingga banyak siswa yang terlihat pasif. Tidak dapat dipungkiri jika hal tersebut dipengaruhi oleh peranan guru di kelas. Guru tidak hanya sekedar mengajar dan mendidik akan tetapi memberi contoh dan teladan kepada siswa agar siswa dapat aktif dan terlibat dalam kegiatan di kelas. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk dianalisis, disajikan, dan ditarik kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk sikap partisipatif siswa seperti pengalaman yang dimiliki siswa dalam bertanya, pengaruh dari perilaku orang lain, pengaruh kebudayaan atau pembiasaan yang dilakukan siswa dalam mengemukakan pendapat, media massa yang berpengaruh dalam cara berbicara siswa terhadap orang lain, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan pengendalian sikap emosional ketika siswa lain yang berbeda pendapat. Semua hal tersebut dapat dilakukan oleh guru PPKn dalam membentuk sikap partisipatif siswa di sekolah menengah atas.

Kata kunci: *Guru PPKn, Peranan Guru PPKn, Sikap Partisipasi*

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to describe the role of PPKn teachers in the formation of student participation attitudes in high school. This is based on the lack of high school student participation in the classroom so that many students look passive. It can not be denied if it is influenced by the role of teachers in the classroom. Teachers not only teach and educate but also provide examples and examples to students so that students can be active and involved in activities in the classroom. The method used is literature study by collecting data from various sources to be analyzed, presented, and drawn conclusions. The result of the formation of participative attitude of the students such as the experience of the students in asking, the influence of the behavior of others, the influence of culture or habituation done by students in expressing opinions, the influential mass media in the way students .

Keywords: *PPKn Teachers, Role of PPKn Teachers, Participation Attitude*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan esensial dalam kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang cerdas dalam memperhatikan dan mewujudkan cita-cita yang mulia. Tidak hanya kepentingan dari penguasa akan tetapi juga bagaimana perwujudan negara yang ingin menjadikan warga negara yang taat dan patuh terhadap peraturan dalam dunia pendidikan. Pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan warga negara agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menjadi manusia yang berkualitas (Sarbaini, Winarso & Jamaludin, 2015: 757).

Akhir-akhir ini banyak sekali yang mencoreng pendidikan. Pendidikan seolah-olah dikuasai oleh elit penguasa yang bertujuan untuk kepentingan politik. Kepentingan politik tersebut menjadi persoalan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh arus globalisasi. Arus globalisasi yang ditandai dengan tindakan korupsi, kekerasan antaragama, kerusuhan yang terjadi antarsiswa (Pangalila, 2017: 91).

Namun hal tersebut tidak memudahkan perwujudan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkatan dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Kesemua tingkatan harus dilakukan dengan strategi yang tepat dan sesuai agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Tujuan tersebut mencakup misi dari seorang warga negara yaitu cerdas, berintelektual, terlibat aktif dalam kegiatan pemerintahan, dan mampu berpartisipasi. Kegiatan partisipasi diupayakan untuk meningkatkan perasaan terlibat dalam berbagai kegiatan. Misalnya ikut dalam kegiatan pemerintahan seperti memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu sebagai warga negara yang baik, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan sebagai upaya mendukung pemerintah (Hafiz & Jumriadi, 2011).

Upaya mendukung kinerja pemerintah seperti seorang individu yaitu siswa dalam sekolah. Siswa ikut berpartisipasi dengan selalu berupaya belajar secara maksimal dan aktif. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Unayah, Nunung & Sabarisman (2015: 137) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi siswa dikalangan menengah atas masih rendah.

Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya minat siswa terhadap topik-topik yang berkaitan dengan pemerintah dalam lingkup sekolah. Padahal pada hakekatnya, siswa sebagai warga negara harus aktif dan bertanggung jawab sebagai pelajar yang mampu berpartisipasi. Suryosubroto (2002: 279) mengemukakan bahwa perlu ada proses belajar yang mampu melibatkan siswa dalam kegiatan yang menghubungkan mental dan emosi siswa.

Misalnya saat siswa memahami jika permasalahan korupsi merupakan hal yang dilarang dan melanggar hukum, maka siswa diharuskan mampu dalam memberikan masukan seperti kritikan terhadap tindakan korupsi tersebut. Tindakan korupsi merupakan permasalahan yang harus dikritik oleh

siswa di kalangan atas sebagai wujud dari warga negara yang baik dengan menciptakan sebuah solusi dari setiap permasalahan.

Sehingga siswa tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru namun juga mampu bertanya dan menjawab secara aktif dari setiap permasalahan yang terjadi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan guru sebagai pendidik. Djamarah (2010: 31) menjelaskan bahwa guru yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mendidik siswa menjadi aktif baik secara individual maupun berkelompok. Selanjutnya berhasil tidaknya perilaku siswa dapat terbentuk dengan baik maka gurulah yang akan banyak berperan dalam pembentukan sikap tersebut (Adawiyah, Ruchliyadi & Yulia, 2015: 703).

Selanjutnya Mulyasa (2007: 53) juga mengemukakan bahwa guru sangat berperan dalam memberikan motivasi kepada siswa, memberikan semangat, dan sebagai penyedia fasilitas seperti memberikan pelayanan kepada siswa yang membutuhkan pembelajaran. Pembelajaran yang sangat berpengaruh pada perwujudan warga negara yang

mampu berpartisipasi yaitu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan menjadikan warga negara mampu berpartisipasi dan terlibat aktif dalam kemajuan sebuah bangsa. Namun, Wahab & Sapriya (2011: 303) mengemukakan bahwa perlu ada kajian ulang terhadap materi dalam PPKn karena masih terkait dengan kepentingan pemerintah yang mengatasnamakan negara.

Seperti hak asasi manusia, politik, secara ekonomi yang tentu saja perlu penyesuaian dengan tujuan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Selanjutnya materi yang telah dirangkum sebelumnya secara struktural dalam RPP belum mampu memuat hal yang perlu dilakukan oleh siswa dalam bertindak jujur dan bertanggung jawab.

Tindakan tersebut perlu diupayakan oleh guru yaitu guru PPKn yang mempunyai peranan penting dalam tindakan siswa yang berkarakter baik. Karakter baik dapat dilakukan dengan adanya kerja sama guru dan siswa melalui mata pelajaran PPKn. PPKn akan menjadi lebih efektif jika diupayakan mampu membuat siswa

dapat berpikir secara kritis, berdemokratis, dan bertindak secara sadar terhadap perilakunya.

Sehingga siswa tidak hanya terfokus untuk mendengarkan akan tetapi siswa bertindak dan melakukan kegiatan sebagai warga negara aktif (Saputro & Nasiwan, 2016: 4-5). Penulisan ini akan mengulas lebih dalam terkait dengan peranan guru PPKn dalam membentuk sikap partisipasi siswa di sekolah menengah atas.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dari beberapa sumber baik jurnal maupun buku untuk dianalisis dan disajikan dalam hasil dan pembahasan serta ditarik simpulan. Hal tersebut akan menghasilkan data deskriptif yang didukung dengan hasil-hasil penelitian untuk dianalisis sebagai bahan rujukan penulisan ini.

Hasil Kajian

A. Guru PPKn

Pembelajaran di kelas perlu adanya mata pelajaran yang mampu mendukung partisipasi siswa di sekolah menengah atas yaitu melalui

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. PPKn sebagai mata pelajaran yang memiliki keunikan tersendiri dari mata pelajaran lain dikarenakan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, PPKn dapat terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Maksudnya ketika guru mengajarkan tentang karakter nasionalisme maka dapat terintegrasi dengan mata pelajaran lain yaitu pendidikan agama, seperti dalam meningkatkan nasionalisme maka tetap berkeyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. *Kedua*, PPKn bertujuan sebagai pandangan hidup secara menyeluruh seperti mempelajari tentang negara, maka tetap memperhatikan masyarakat. *Ketiga*, PPKn mampu untuk menjadikan siswa agar dapat berpartisipasi (Potter, 2002: 57-66).

Kesemua alasan tersebut yang menjadikan PPKn sebagai mata pelajaran yang mampu menyiapkan generasi muda untuk bersaing secara global. PPKn dapat diajarkan oleh guru PPKn dengan tidak hanya memberikan dan menyampaikan pengetahuan akan tetapi mengimplementasikan dalam

kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang mampu berpartisipasi (Comber, 2005: 22).

Sehubungan dengan hal tersebut, guru PPKn merupakan yang ditujukan agar memiliki berbagai kompetensi mencakup keahlian dalam bidangnya mengajar, memiliki hubungan baik dengan guru yang lain, mampu memberikan contoh atau teladan sebagai warga negara yang baik, dan mampu menunjang etika sebagai guru yang baik (Sapriya dkk, 2005: 5-6). Dapat dikatakan bahwa, guru PPKn sebagai guru yang tidak hanya mampu mendidik dan mengajar akan tetapi bagaimana seorang guru memberikan contoh atau teladan kepada orang lain.

B. Peranan Guru PPKn

Setiap guru mempunyai fungsi dan perannya masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan terhadap cita-cita bangsa. Salah satunya yaitu guru PPKn mempunyai peranan yang tidak hanya sebagai pendidik akan tetapi juga mampu memiliki keahlian khusus. Usman (2009: 5) mengemukakan bahwa guru PPKn harus mampu memberikan informasi kepada siswa

terkait dengan sumber seperti buku dan internet.

Namun, siswa yang banyak berperan dalam proses pembelajaran di kelas sesuai dengan kurikulum 2013 yaitu *student center*. Selain itu, guru PPKn juga harus mampu dalam mengembangkan kurikulum terkait dengan pengajaran dan penilaian dengan menyesuaikan beberapa komponen seperti pengetahuan,

C. Sikap Partisipasi

Siswa perlu memiliki sikap berpartisipasi karena hal tersebut penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap partisipasi merupakan perasaan emosional dari seorang individu dalam mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dengan sikap yang matang secara mental (Davis, Keith & Newstrom, 2000: 142).

Selanjutnya sikap partisipasi perlu ada dalam diri siswa dengan ikut berperan dan terlibat pada kegiatan sekolah maupun masyarakat (Sumaryadi, 2005: 46). Siswa sebagai subjek dari proses pembelajaran.

Sikap tersebut dapat ditanamkan melalui pembelajaran pendidikan pancasila dan

sikap, dan keterampilan.

Selanjutnya guru perlu memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa di kalangan menengah atas agar mampu berpartisipasi sebagai wujud nyata warga negara yang baik. Tidak hanya itu, guru bukan sekedar mengajar tetapi bagaimana membentuk perilaku siswa (Harrison & Killion, 2007: 74-77).

kewarganegaraan. Pembelajaran yang dimaksud untuk membentuk sikap siswa dalam berpartisipasi (Chareka & Sears, 2006: 523). Sikap berpartisipasi siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. *Pertama*, sikap siswa akan terbentuk berdasarkan pengalaman pribadinya yang disebabkan oleh perasaan emosional. *Kedua*, sikap siswa dipengaruhi oleh perilaku orang lain, misalnya jika perilaku seseorang baik maka akan berdampak positif pada orang disekitarnya. *Ketiga*, pengaruh kebudayaan yang akan membentuk sikap seseorang dalam kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat yang harus memberi contoh yang baik kepada seorang individu sebagai warga negara yang baik. *Keempat*,

pengaruh media massa dalam pembentukan sikap seseorang. *Kelima*, lembaga pendidikan dan lembaga agama yang pada hakekatnya mengajarkan tentang perilaku baik. *Keenam*, sikap emosional yang akan mengendalikan siswa dalam berpartisipasi (Azwar, 2005: 30-38).

Pembahasan

A. Guru PPKn

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah menengah atas. Mata pelajaran PPKn yang bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik (*good citizen*). Tidak dapat dipungkiri jika PPKn sebagai landasan atas dasar pembentukan sikap siswa di sekolah.

Pada hakekatnya pembentukan sikap siswa dapat dilakukan oleh guru PPKn. Guru PPKn mempunyai peranan penting dalam mengajarkan, mendidik, dan memperbaiki perilaku siswa agar menjadi lebih baik. Guru PPKn juga tidak hanya sekedar mengajar di kelas, menyusun rencana pembelajaran, akan tetapi juga

dalam hal memberikan penilaian terhadap sikap siswa.

B. Peranan Guru PPKn

Guru PPKn mempunyai peran dalam membentuk sikap siswa selain guru agama. Setiap guru diharuskan dan diwajibkan untuk tidak hanya mendidik akan tetapi juga berperan dalam membentuk sikap. Peranan guru PPKn pada hakekatnya sebagai pendidik untuk mengajarkan pentingnya dalam berbuat kebaikan agar sesuai dengan aturan sekolah.

Selain itu, guru PPKn mempunyai peranan dalam menyediakan sumber belajar bagi siswa baik dari media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya guru PPKn juga harus mampu dalam membuat perencanaan pembelajaran dan disesuaikan dengan karakteristik siswa.

C. Sikap Partisipasi

Siswa sebagai subjek dalam pembelajaran atau yang disebut dengan *student center* mempunyai keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa tidak hanya memahami, mengerti bagaimana

berpartisipasi dalam kegiatan di kelas. Siswa diharuskan agar aktif dalam kegiatan pembelajaran dan tidak diam atau pasif.

Sesuai dengan kurikulum 2013 yang berlaku bahwasanya siswa diberi motivasi agar selalu aktif untuk bertanya, memberikan jawaban jika ada siswa lain bertanya, mengemukakan pendapat berupa ide, gagasan, maupun informasi kepada siswa lainnya. Siswa juga diupayakan memiliki sikap yang partisipatif dan sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu *good citizen*.

D. Peranan Guru PPKn dalam Pembentukan Sikap Partisipasi Siswa di Sekolah Menengah Atas

Siswa di sekolah menengah atas sebagai subjek dalam pembelajaran, tentunya mempunyai peran penting dalam kegiatan pembelajaran yang diawasi oleh guru. Guru dalam pembentukan sikap partisipasi siswa yaitu guru PPKn. Guru PPKn tidak hanya berperan sebagai pendidik maupun sebagai pengajar akan tetapi bagaimana membentuk sikap siswa agar tidak pasif.

Upaya yang dilakukan oleh guru tidak hanya mentransfer

pengetahuan tetapi juga upaya dalam membentuk sikap partisipasi. Sikap partisipasi sangat diperlukan siswa dengan terlibat dalam proses pembelajaran dengan antusias dan semangat, bertanya dan memberi tanggapan kepada siswa lain yang bertanya dengan memberikan ide atau gagasan. Hal tersebut dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok.

Pembentukan secara individu dan kelompok dapat dilakukan guru PPKn dengan meningkatkan sikap partisipatif siswa yaitu sebagai berikut.

Pertama, pengalaman pribadi siswa yang akan mempengaruhi tingkat partisipatifnya sehingga siswa akan dibiasakan untuk bertanya, menjawab, memberi pendapat, berkomentar terhadap kinerja orang lain. Selain itu, siswa setiap pelajaran PPKn akan dimulai, guru PPKn membiasakan siswa untuk bertanya, dan lama kelamaan akan menjadi pengalaman dirinya.

Kedua, siswa akan dibentuk melalui perilaku orang lain. Perilaku orang lain akan memotivasi siswa

untuk terdorong mengemukakan pendapat. Siswa akan mencontoh tindakan yang dilakukan oleh orang lain seperti guru PPKn ketika memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari siswa lain sehingga siswa yang pasif bertanya akan terdorong untuk bertanya.

Ketiga, siswa akan terbentuk melalui kebudayaan atau pembiasaan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya dalam menyanggah pendapat siswa lain yang berbeda dengannya, maka siswa akan membiasakan diri untuk mengritik pendapat yang berbeda.

Keempat, sikap partisipatif siswa dipengaruhi oleh media massa. Artinya siswa akan mencontoh dan melihat perilaku orang lain. Misalnya cara berbicara dengan sikap yang aktif dan antusias.

Kelima, pengaruh dari lembaga pendidikan dan lembaga agama yang membentuk sikap siswa dalam berpartisipasi. Misalnya lembaga pendidikan seperti komunitas dalam berorganisasi yaitu OSIS. Osis yang diadakan di sekolah bertujuan untuk membuat

siswa berani untuk mengemukakan pendapat.

Keenam, sikap emosional akan berpengaruh pada pembentukan sikap partisipatif siswa. Siswa yang mampu mengendalikan emosional ketika adanya siswa lain melakukan perdebatan dikarenakan berbeda pendapat. Tentu saja siswa akan berusaha untuk mempertahankan pendapat yang ada pada dirinya.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukakan bahwasanya guru PPKn memiliki peranan penting dalam pembentukan sikap partisipasi selain guru lain seperti guru agama. Guru tidak hanya terfokus untuk mendidik dan mengajar akan tetapi juga upaya dalam pembentukan sikap partisipasi.

Sikap partisipasi merupakan sikap yang penting dalam diri siswa agar mampu bertanya dengan mendiskusikan terkait dengan permasalahan yang terjadi baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan begitu, maka guru PPKn dapat berperan dalam mewujudkan siswa di sekolah menengah atas sebagai warga

negara yang baik dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu cerdas, intelektual, mampu berpartisipasi, dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sekolah maupun masyarakat.

Daftar Pustaka

- Azwar, S. (2005). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adawiyah, R., Ruchliyadi, D. A., & Yulia, K. (2015). Hubungan Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru PKN dengan Prestasi Belajar di Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5 (9).
- Chareka, T., & Sears, A. (2006). Civic Duty: Young People's Conceptions of Voting As A Means of Political Participation. *Canadian Journal of Education*, 29 (2), 521-540.
- Comber, M. K. (2005). Civic Skills and Civic Education: An Empirical Assessment. *Dissertation*. Faculty of The Graduate School of The University of Maryland.
- Davis, Keith., & Newstrom. (2000). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Djamarah, S. B. (2010). *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hafiz, A., & Jumriadi. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Studi Pada Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Kejuruan (SMK-YPK) Banjarbaru. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7 (1).
- Harrison, C., & Killion, J. (2007). Ten Roles for Teacher Leaders. *Journal Teacher As Leaders*, 65 (1), 74-77.
- Husaini, U. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2007). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Jakarta: Gramedia.
- Pangalila. (2017). Peningkatan Civic Disposition Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7 (1).
- Potter, J. (2002). The Challenge of Education for Active Citizenship. *Educating and Training*, 44 (2), 57-66.
- Sapriya & Wahab A. Azis. (2011). *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI Press.
- Sapriya, dkk. (2005). *Pedoman Sosialisasi Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2004*. Jakarta: Depdiknas.
- Saputro, B. D., & Nasiwan. (2016).

Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengembangan Organisasi Siswa Intra Sekolah Sebagai Pendidikan Politik di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Universitas Negeri Yogyakarta.

Sarbaini., Winarso, H. P., & Jamaludin, M. (2015). Hubungan Karakter Berdemokrasi dan Hasil Belajar PKN di MAN 2 Kandangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5 (9).

Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suryosubroto. (2002). *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka belajar.

Unayah, Nunung., & Sabarisman. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Sosio Informal*, 1 (2).